



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 dan untuk mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa Berprestasi;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 83 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (1) huruf c Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - c. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai kriteria penerima beasiswa perlu maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau Kembali untuk dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa Berprestasi ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI

7

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Pinan Tahun 2021 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pemberian Beasiswa Pendidikan dilakukan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria :
 - a. umum; dan
 - b. khusus.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. warga negara indonesia yang beralamat di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
 - b. telah diterima sebagai mahasiswa pada PTN, PTS dan Program Studi yang telah memiliki akreditasi A dan B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - c. mahasiswa berasal dari keluarga kurang mampu yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); atau dengan Rekomendasi dari Dinas Sosial yang memiliki Prestasi tertentu dari kriteria Akademik, Olahraga, Keagamaan, Inovasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepemimpinan dan Kreativitas;
 - d. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik Pemerintah Pusat dan Daerah maupun swasta, dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai cukup; dan
 - e. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Prestasi Akademik; atau
 - b. Prestasi Non Akademik.
- (4) Prestasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu memiliki IPK paling rendah 3,50 (tiga koma lima puluh) untuk biaya penyelenggaraan Pendidikan dan IPK paling rendah 3,0 (tiga koma nol) untuk Bantuan Penyelesaian Studi.
- (5) Prestasi Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. prestasi olahraga;
 - b. Prestasi keagamaan;

- c. inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
- d. kepemimpinan.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 27 November 2023
BUPATI PINRANG


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 27 November 2023
SEKRETARIS DAERAH


CALO KERRANG

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR58.....

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KABUPATEN PINRANG NOMOR 38
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA AKSI
DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN
LAYAK ANAK KABUPATEN PINRANG TAHUN
2022-2024

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022- 2024

No	Indikator KLA / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Uraian	Satuan	DATA DAFTAR TAHUN 2022	Target			Alokasi Pendanaan (Rp. Jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024			
1	KELEMBAGAAN									
1	Indikator KLA : 1 . Peraturan Daerah tentang KLA									
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINERONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Daerah KLA	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/ Wali Kota, Keputusan Bupati/ Wali Kota, Instruksi Bupati /Wali	Peraturan /Kebijakan	11	1	1	14.000.000	Bappelitbangda	
	Program: 2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan									
	2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/ Wali Kota, Keputusan Bupati/ Wali Kota, Instruksi Bupati /Wali			2	2		Dinas P2KBP3A	
2	Indikator KLA : 2 . Penguatan Kelembagaan KLA									
			Fasilitasi penguatan kapasitas gugus tugas KLA	Jumlah Kegiatan Kapasitas Peningkatan Jawaab Indikator, Kelembagaan, Dan Klaeter Gugus Tugas	Sosialisasi	1	1	1	Dinas P2KBP3A	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINERONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah pelaksanaan forum koordinasi Gugus Tugas KLA	Rapat	2	2	2		Bappelitbangda	
			Penyusunan RAD KLA	Dokumen dengan dokumen perencanaan	1	1	1		Bappelitbangda	

No	Indikator KLA / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	DATA DASAR TAHUN 2022	Target			Alokasi Pendanaan (Rp. Jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	2024		
		Perbaruan Profil KLA	Profil KLA yang diperbarui secara berkala	Dokumen	1	1	1		Dinas P2KBP3A	
		Facilitasi pemberdayaan anak di desa (Desa Ramah Anak)	Jumlah desa yang melaksanakan fasilitasi pemberdayaan anak di desa (Desa Ramah Anak)	Desa	20	3	21	255.852.000	Dinas PMD	
		Pelatihan bagi sumber daya manusia (SDM) perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) tentang perlindungan anak, termasuk eksploitasi seksual anak melalui media online	Jumlah SDM PATBM yang terlatih perlindungan	Orang	423	197		9.500.000	Dinas PMD/Dinas P2KBP3A	
3	Indikator KLA : 3. Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Penguatan pembelajaran dan penguatan pelaksanaan Hak Anak (PUHA) bagi forum lembaga profesi	Jumlah SDM organisasi keagamaan yang mendapat penguatan pembelajaran PUHA	SDM	20	10	10		Kemennag	
			Jumlah lembaga keagamaan	lembaga	12	3	3		Kemennag	
	13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat									
	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya, hukum adat yang serta dalam daerah kabupaten/kota	2.13.05.2.01.09 fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Penguatan peran PKK melalui 10 (sepuluh) program pokok PKK (penghayatan dan pengalaman Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkeperasi, kelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat	Jumlah program/panduan 10 (sepuluh) Program pokok PKK untuk diimplementasikan menjadi Program Desa/Kelurahan Layak Anak	- Dokumen - Laporan	1 dokumen 1 laporan	1 dokumen 1 laporan	1 dokumen 1 laporan	700.012.800	Dinas PMD
	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	perencanaan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA)	Jaringan Media Peduli Anak Jaringan	0	1	1	5.000.000	Diskominfo	

No	Indikator KLA / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	DATA DASAR TAHUN 2022	Target			Alokasi Pendanaan (Rp. Jt) Anggaran	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024			
	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Hubungan Media	penguatan pembelajaran PUHA bagi media	jumlah media cetak yang mendapat penguatan pembelajaran PUHA	SDM	0	25	25	25.000.000	Diskominfo
II KLASER HAK SIPIL DAN KEBERBASAN										
Indikator KLA: 4. Anak yang memiliki Kartu Anak Kelahiran										
2.12.03 Program Pencatatan Sipil / 2.12.02 Pelayanan Pendaftaran Penduduk										
	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran	%	99	99	100	20.000.000	Disdukcapil
	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah KIA	Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	50.000.000	Disdukcapil
	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam	Sosialisasi dan advokasi kebijakan	jumlah kecamatan/desa/kelurahan yang tersosialisasikan	Kecamatan/desa/Kelurahan	12 Kecamatan dan 104	12 Kecamatan dan 104	12 Kecamatan dan 2 kali	50.000.000	Disdukcapil & Dinas PMD
	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	pemenuhan hak sipil anak melalui kepemilikan akta kelahiran	tersosialisasikan kebijakan pemenuhan Hak Anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis					20.000.000	Disdukcapil
5 Indikator KLA: 5. Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)										
2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik										
	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Penyebaran informasi Layak Anak	Jumlah Konten informasi Layak Anak yang tersebar melalui forum Anak	Eksemplar (produk konten cetak, digital)	0	9	36	13.120.000	Diskominfo
	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kermitraan Komunitas	Penyuluhan hak sipil anak melalui media	Jumlah sosialisasi informasi layak anak melalui media below the line	Kegiatan	0	4	4	12.372.000	Diskominfo
	Kegiatan : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Sosialisasi Budaya Baca Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Facilitasi Pemenuhan Hak Anak atas Informasi Layak Anak (ILA)	Jumlah daerah yang tersosialisasikan hak anak atas Informasi Layak Anak (ILA)	-Kecamatan -Desa/Kelurahan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	Tahun 2023 : Rp 85.170.000 Tahun 2024 : Rp 70.000.000	Perpustakaan
	Kegiatan : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.01	Perbinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh wilayah	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina (Kabupaten/ Kota memiliki layanan perpustakaan Anak dari ekstensifikasi	Perpustakaan Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/ Desa/ Kelurahan	12	12	12	Tahun 2023 : Rp 29.600.000 Tahun 2024 : Rp 29.600.000	Dinas Perpustakaan

No	Indikator KLA / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	DATA DASAR TAHUN 2022	Target			Alokasi Pendanaan (Rp. Jt) Anggaran	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024			
	Kegiatan : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Sosialisasi Budaya Baca Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	Kegiatan	2	3	3	Tahun 2023 : Rp 200.451.000 Tahun 2024 : Rp 185.451.000	Dinas Perpustakaan	
	Kegiatan : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah	Sub kegiatan : 2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi	Tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh anak	%	75%	82%		Dinas Perpustakaan		
	Kegiatan : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan	Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan	Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Perpustakaan Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/K	10	10	10	Tahun 2023 : Rp 27.625.000 Tahun 2024 : Rp	Dinas Perpustakaan	
	Indikator KLA: 6. Pelambungan Partisipasi Anak		Jumlah pojok baca digital area publik di kabupaten/kota/kecamatan	Pojok baca digital	2	2	2	Tahun 2023 : Rp 9.032.300 Tahun 2024 : Rp	Dinas Perpustakaan	
6										
Program: 2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak										
	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan	2.08.06.2.02.03 Pengembangan	Facilitasi dan penguatan kapasitas forum anak	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang	-Kecamatan	6	9	12	Dinas P2KBP3A	
			Pelatihan bagi forum anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah Anak anggota forum Anak sebagai 2P	-Forum Anak Kabupaten/Kota -Forum Anak kecamatan	30 anak	60 anak	90 anak	Dinas P2KBP3A	
			Penguatan kapasitas fasilitator forum Anak	Jumlah Fasilitator forum An	-Kecamatan	5	5	5	Dinas P2KBP3A	
			Facilitasi penguatan peran forum Anak sebagai 2P	Jumlah daerah yang terlibat dalam pertemuan Forum Anak Nasional	Kabupaten/Kota	-	1	1	Dinas P2KBP3A	
III KLASIFIKASI LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF										
7										
Indikator KLA: 7. Pencegahan Perkawinan Anak										
Program: 2.08.03 Program Perlindungan Perempuan										
	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perkawinan Anak	Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun	%	0,12	0,11		Dinas P2KBP3A	
			Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pengasuhan berbasis hak Anak	Pasangan	314	434	534	Dinas P2KBP3A	
8.										
Indikator KLA: 8. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyediaan Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua Keluarga										
Program:										

No	Indikator KLA / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	DATA DASAR TAHUN 2022	Target			Alokasi Pendanaan (Rp. Jt) Anggaran	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024			
	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Pasangan	3,214	3,225	3,242		Kemeneg	
	Program: 1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial									
	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Kelembagaan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan psikotaka sahinah	Lembaga	1	1	1	Rp 6.700.000,00	Dinas Sosial	
	Program : 1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan									
	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas jenjang pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	%	56,27%	60,00%	65,00%	77.631.400.000	Dikbud	
		1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar						657.630.000		
	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Perentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	60,34%	65,00%	70,00%	29.656.400.000	Dikbud	
	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0024 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	Konten	0	0	1	837.990.570	Dikbud	
		1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Konten Penguatan Karakter Satuan Pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan					321.513.000		
		1.01.02.2.01.50 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						297.754.000		
	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0037 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah konten penguatan karakter Keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	0	1	1	985.307.310	Dikbud	

No	Indikator KLA / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	DATA DASAR TAHUN 2022	Target			Alokasi Pendanaan (Rp. Ji) Anggaran	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024			
			Jumlah Konten Penguatan Karakter Masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	0	0	1	238.128.000	Dikbud	
								352.315.085		
9. Indikator KLA: 9. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)										
Program : 1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan										
	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.11.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Peringkat satu PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	%	26,67%	35,56%	44,44%	236.770.000	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.11.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Peringkat satu PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	%	100%	100%	100%	236.770.000	Dinas Pendidikan	
		1.11.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak Usia Dini bagi Perawat, Bidan, Pengasuh dan Pendamping, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kader, Penyuluh, dan SDM Lainnya	Persen	4,47%	86,18%	12,60%	236.770.000	Dinas Pendidikan	
10. Indikator KLA: 10. Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif										
Program: 1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial										
	Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan: 1.16.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Pensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Keremangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang terakreditasi	Lembaga	6	6	6	Rp 45.650.000,00	Dinsos
			Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Taman Anak Sejahtera (TAS)	Jumlah LKSA yang terakreditasi	Lembaga	0	0	0		Dinsos
			Pelaksanaan standarisasi daycare ramah Anak	Jumlah daycare Ramah Anak	Lembaga	0	0	0		Dinsos

No	Indikator KLA / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Uraian	Satuan	DATA DASAR TAHUN 2022	Target			Alokasi Pendanaan (Rp. Jt) Anggaran	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024			
	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kab/kota	1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Cakupan ibu hamil diskriming hepatitis B	RS	2	3	3	12.600.000	Dinkes	
12	Indikator KLA: 13. Status Gizi Balita Program: 1.02.02 Program Pemenuhan Uprya Kesehatan Perorangan dan Uprya Kesehatan Masyarakat									
	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kab/kota	1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita usia 6-59 bulan mendapatkan vitamin A	97,37%	89%	90%	APBN	Dinkes	
	2.08.06.2.02 Penguatan Lembaga Penyedia Layanan dan Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemerintahan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemerintahan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan bagi forum Keluarga dalam 2P Gizi	Jumlah daerah yang memiliki forum Keluarga 2P Gizi	6	9	12	506.890.000	Dinkes / Dinas P2KBPA	
14	Indikator KLA: 14. Pemberian Makan Pada Bayi dan Anak (PMB) Usia di Bawah 2 Tahun Program: 1.02.02 Program Pemenuhan Uprya Kesehatan Perorangan dan Uprya Kesehatan Masyarakat									
	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kab/kota	1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peningkatan gizi anak di bawah usia 2 (dua) tahun	Persentase Bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif	74,60%	75%	80%	506.890.000	Dinkes	
15	Indikator KLA: 15. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak Program: 1.02.02 Program Pemenuhan Uprya Kesehatan Perorangan dan Uprya Kesehatan Masyarakat									
	Kegiatan	Sub Kegiatan	Fasilitas Pelayanan ramah Anak difasilitasi Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai standar	94,40%	94,40%	100%	-	Dinkes	
			Pelayanan Kesehatan Anak	Persentase rumah sakit terakreditasi	100	100	100	-	Dinkes	
			Pelayanan Kesehatan bayi/Anak dari ibu terinfeksi HIV dan sifilis	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	5705	97%	100	-	Dinkes	
				Persentase Kecamatan mampu Proflektas	100	100	100	-	Dinkes	

No	Indikator KILA / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Setuan	DATA DASAR TAHUN 2022	Target			Alokasi Pendanaan (Rp. Jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024	Anggaran		
	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kab/kota	1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Permutasi Penulisan hepatitis B dari ibu ke Anak	%	100	100	100	13.600.000	Dinkes	
			Persentase Bayi lahir dari ibu dengan Hbseg reaktif diberi HBO dan HBilitg kurang dari <24 jam setelah kelahiran	%						
			Terapi pencegahan TB bagi balita kontak serumah dengan pasien TB	%	5%	10%	25%	-	Dinkes	
			Provinsi dengan proporsi kasus kusta Anak di antara kasus baru <5%	Jumlah absolut	15	16	16	-	Dinkes	
			Pelayanan deteksi dini Anak dengan pneumonia	%	100	100	100	13.600.000	Dinkes	
			Balita memiliki buku KIA	%	99,90%	80%	85%	APBN	Dinkes	
			Peringkatkan upaya Kesehatan jiwa pada Anak	%	911 org	60%	90%	21.840.000	Dinkes	
			Facilitasi pelayanan Ramah Anak di puskesmas	Puskesmas	100	100	100	-	Dinkes	
			Jumlah puskesmas yang difasilitasi dengan pelayanan Ramah Anak	Puskesmas	17	18	18	-	Dinkes	
			Jumlah puskesmas difasilitasi dalam pelayanan ramah Anak di Puskesmas							
			Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Orang	17	18	18	-	Dinkes	
			Jumlah tenaga kesehatan (puskesmas) terlatih KHA							
16	Indikator KILA: 16. Lansjungan Sehat									
	Program: 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat									
			Peningkatan Perancangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100	100	100	-	Dinkes	
			Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak serta terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat	%						
			Kabupaten/Kota Sehat	Kabupaten Kota/Sehat	1	1	1	-	Dinkes	
			Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%				25.500.000	Dinkes	
	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kab/kota	1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lansjungan								

No	Indikator KLA / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal	Ukuran	Satuan	DATA DASAR TAHUN 2022	Target			Alokasi Pendanaan (Rp. Jt)	Instansi
						2023	2024	Anggaran		
	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kab/kota	1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	%	100	100	100	30.600.000	Dinkes	
	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kab/kota	1.02.02.2.02.18 Promosi Kesehatan	Persentase posyandu aktif	%	89,57%	90%	90%	31.890.000	Dinkes	
17	Indikator KLA: 17. Ketersediaan kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (Ips) Rokok									
	Program: 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat									
	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kab/kota	1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kecamatan	12	12	12		Dinkes	
V	KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA									
18	Indikator KLA: 18. Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun									
	Program: 1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan									
	1.01.02.2.03. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.40 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Angka partisipasi kasar pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	Persen	25,62%	30	35	2.222.800.000	Dikbud
		1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD						833.655.000		
		1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						3.844.993.000		
		1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD						2.195.379.440		
		1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD						967.405.000		
	1.01.02.2.01. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.47 Penambahan Ruang Kelas Baru	Angka partisipasi kasar SD/MT/SDLB/ sederajat	Persen	97,44%	98	98,5	8.019.710.000	Dikbud	
		1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						3.723.780.000		

No	Indikator KLA / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	DATA DASAR TAHUN 2022	Target		Alokasi Pendanaan (Rp. Jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024		
		1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah						1.862.788.000	
		1.01.02.2.01.06 Pembangunan Serana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						18.610.213.600	
		1.01.02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Perjaga Sekolah						1.426.930.000	
		1.01.02.2.01.51 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas						57.609.256.376	
		1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						3.633.558.000	
		1.01.02.2.01.48 Rehabilitasi Sedang/Berat Serana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah						3.669.346.000	
		1.01.02.2.01.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah						918.450.000	
		1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah						2.796.740.000	
		1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah						1.629.840.000	
		1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						105.911.000	
		1.01.02.2.02.6 Pembangunan Laboratorium						1.592.870.000	Dikbud
	1.01.02.2.02. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Angka partisipasi kasar SMP/MTs/ SMP LB sederajat	Persen	75,28%	76	76,5		

No	Indikator KLA / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Awal	Ukuran	Satuan	DATA DASAR TAHUN 2022	Target		Alokasi Pendanaan (Rp. Jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024		
	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0024 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		SD/MI/MYS	327	319	319	837.990.570	
		1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						321.513.000	
	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0037 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama		SMP/Mts	58	57	57	985.307.310	
		1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						238.128.000	
	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0024 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		SD	327	319	319	837.990.570	Dikbud
		1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						321.513.000	
	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0037 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama		SMP	58	57	57	985.307.310	
		1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						238.128.000	
	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0024 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		Penggiat	1	1	1	837.990.570	Dikbud

No	Indikator KLA / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Setuan	DATA DASAR TAHUN 2022	Target			Alokasi Pendanaan (Rp. Jt) Anggaran	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024			
	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							985.307.310	
	1.01.02.2.02.00051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								238.128.000	
	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Pembinaan dan penghargaan gerakan peduli dan bertudaya lingkungan hidup di sekolah	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (Sekolah adiwiyata nasional dan mandiri)	Sekolah	41	96	150	837.990.570	Dikbud dan DisperkimLH
	1.01.02.2.01.00038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								321.513.000	
	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							985.307.310	
	1.01.02.2.02.00051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								238.128.000	
	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kegiatan Pekerja Sosial Goes To School untuk Anak	Jumlah Anak yang mengikuti kegiatan Pekerja Sosial Goes To school	Anak	65.996	65.338	65.500	837.990.570	Dikbud/Dinsos
	1.01.02.2.01.00038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								321.513.000	
	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							985.307.310	
	1.01.02.2.02.00051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan								238.128.000	
20	Indikator KLA: 20. Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak									
	Kegiatan : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kegiatan kreativitas dan budaya	Jumlah pojok baca digital yang terbangun dan terseleenggara di daerah	Lembaga	2	2	2	Tahun 2023 : Rp 9.032.300 Tahun 2024 : Rp 9.032.300	Dinas Perpustakaan

No	Indikator KLA / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencans Aksi	Ukuran	Satuan	DATA DASAR TAHUN 2022	Target		Alokasi Pendanaan (Rp. Jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024		
VI	KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS								
21.	Indikator KLA: 21.a Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Anak								
a	Program:								
		Facilitasi pencegahan dan penangan Anak korban kekerasan dan eksploitasi	Prevalensi kekerasan terhadap Anak	%	0,55	0,06	0,04	Dinas P2KBP3A	
			Jumlah SDM dan sarana/prasarana (MOLIN) yang memadai untuk layanan Anak korban kekerasan dan derelantaran	Orang	3	3	9		
	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik								
	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemruan Komunitas	Facilitasi pencegahan dan penangan Anak korban kekerasan dan eksploitasi	Jumlah Kecamatan desa/kelurahan terlatih internet aman untuk Anak	-Kecamatan -Desa/Kelurahan	0	0	12.372.000	Diskorninfo, Dinas PMD
			Pelatihan bagi forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang memiliki forum anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan terhadap Anak	-Kecamatan -Desa/Kelurahan	4 7 desa	4 7 desa		Dinas PMD
			Pelatihan bagi Lembaga layanan penangan Anak korban kekerasan	Lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi	UPTD		1		DP2KBP3A
				Standar layanan bagi Anak korban dan pelaku kekerasan dan eksploitasi	Kabupaten/Kota		1		DP2KBP3A
				Jumlah daerah yang sumber daya manusia unit layanan telah dilatih mensiemen kasus	Kabupaten/Kota		1		DP2KBP3A
			Pelatihan bagi Lembaga layanan penangan Anak korban kekerasan	Lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi	UPTD		1		DP2KBP3A
				Standar layanan bagi Anak korban dan pelaku kekerasan dan eksploitasi	Kabupaten/Kota		1		DP2KBP3A
				Jumlah daerah yang sumber daya manusia unit layanan telah dilatih menajemen kasus	Kabupaten/Kota		1		DP2KBP3A

No	Indikator KIIA / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Uraian	Satuan	DATA DASAR TAHUN 2022	Target			Alokasi Pendanaan (Rp. Jt) Anggaran	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024			
	1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kelompok Eks Penderita Kusta di Lauleng yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan	Forum	1	1	1	Rp. 77.910.000,00	Dinsos	
	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Media	0	0	1	12.372.000	Diskominfo	
			fasilitasi perlindungan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi	Lembaga			12		Dinsos	
			Jumlah media KIE melalui media publik tentang perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi anak penyandang disabilitas, minoritas, dan terisolasi				12		Dinas P2KBP3A, Dinsos, PMD, Kecamatan	
			Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganen perlindungan anak berkebutuhan khusus							
			Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang difasilitasi untuk pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus							
23.	Indikator KIIA: 23. b Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)									
b	Program :									
	Kegiatan	Sub Kegiatan	Fasilitasi perlindungan anak PSM	Jumlah kecamatan dan desa / kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan perlindungan anak dengan PSM	-Kecamatan -Desa / Kelurahan		12		Dinas P2KBP3A, Dinsos, PMD, Kecamatan	
	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Media KIE melalui media publik tentang perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak dengan	Media	0	0	1	12.372.000	Diskominfo
24.	Indikator KIIA: 24.a Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (husus poltek)									
	Program : 1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial									
	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Parit Sosial	1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pendampingan dan penguatan ABH tingkat Kepolisian, Kejaksan dan Pengadilan dalam proses Diversi	Persentase ABH yang mendapatkan penetapan diversi di tingkat penyelidikan	%	100%	100%	100%	Rp. 12.785.000,00	Dinsos

No	Indikator KLA / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Uraian	Setuan	DATA DASAR TAHUN 2022	Target		Alokasi Pendanaan (Rp. Jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2023	2024		
		Facilitasi penanganan ABH	Jumlah kegiatan forum koordinasi penanganan ABH	kegiatan			3	DP2KBP3A	
			Peningkatan kapasitas APH	APH			6	DP2KBP3A/ Polres	
			Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan agar anak tidak menjadi ABH	Kabupaten/Kota			1	DP2KBP3A/ Polres	
24. Indikator KLA: 24. b Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya									
b	Program:								
	Kegiatan	Sub Kegiatan	Facilitasi penanganan anak korban jaringan terorisme	Kabupaten/Kota	0	0	0		Kesbangpol
			Jumlah kegiatan forum koordinasi penanganan anak korban jaringan terorisme di pusat dan provinsi	Kabupaten/Kota	0	0	0		Kesbangpol
			Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan agar anak tidak menjadi korban jaringan terorisme	Kabupaten/Kota	0	0	0		Kesbangpol

BUPATI PINRANG


IRWAN HAMID